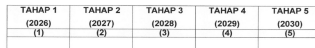


FORMAT TINDAK LANJUT

No	Sistematika Dokumen Renstra	checklist	checklist SIPD	Rekomendasi	TINDAK LANJUT	
					Halaman	KETERANGAN
Bab I	Pendahuluan					
1.1	Latar Belakang	√				
1.2	Dasar Hukum Penyusunan			1. WAJIB ADA : Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);	11	Sudah disusun/dipenuhi sesuai rekomendasi
				2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029	12	Sudah disusun/dipenuhi sesuai rekomendasi
				3. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 Nomor 8);	12	Sudah disusun/dipenuhi sesuai rekomendasi
				4. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029;	12	Sudah disusun/dipenuhi sesuai rekomendasi
				5. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;	12	Sudah disusun/dipenuhi sesuai rekomendasi
				6. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Kabupaten Gresik	12	Sudah disusun/dipenuhi sesuai rekomendasi
				7. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	11	Sudah disusun/dipenuhi sesuai rekomendasi
				8. Peraturan Bupati Gresik Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Satu Data Kabupaten Gresik	12	Sudah disusun/dipenuhi sesuai rekomendasi
1.3	Maksud dan Tujuan			Maksud dan Tujuan Perangkat Daerah disamakan semua, dan dinarasikan sebagai berikut:		Sudah disusun/dipenuhi sesuai rekomendasi
				MAKSUD :		
				Penyusunan dokumen rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah oleh perangkat daerah selama periode lima tahun. Dokumen ini menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah tahunan serta sebagai acuan dalam mengukur kinerja Perangkat Daerah.	12	Sudah disusun/dipenuhi sesuai rekomendasi
				TUJUAN		
				1. Menyusun arah kebijakan dan program pembangunan perangkat daerah yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah.	13	Sudah disusun/dipenuhi sesuai rekomendasi
				2. Menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah dengan tujuan pembangunan jangka menengah daerah (ROJMD).	13	Sudah disusun/dipenuhi sesuai rekomendasi
				3. Menentukan indikator kinerja dan target yang terukur sebagai dasar evaluasi pencapaian kinerja Perangkat Daerah.	13	Sudah disusun/dipenuhi sesuai rekomendasi
				4. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas kinerja Perangkat Daerah dalam pelayanan publik.	13	Sudah disusun/dipenuhi sesuai rekomendasi
				5. Menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan (Renja) dan dokumen Anggran (RKA/DPA) Perangkat Daerah.	13	Sudah disusun/dipenuhi sesuai rekomendasi
1.4	Sistematika Penulisan	√			13	Sudah disusun/dipenuhi sesuai rekomendasi
Bab II	Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah				15	
2.1	Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	√		2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD, agar Nama BAB dan Sub Bab disesuaikan dengan Imendagri 2 Tahun 2025	16	Sudah disusun/dipenuhi sesuai rekomendasi
2.1.1	Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah				16	Sudah disusun/dipenuhi sesuai rekomendasi
2.1.2	Sumber daya Perangkat Daerah	√			23	Sudah disusun/dipenuhi sesuai rekomendasi
2.1.3	Kinerja pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya)	√		Tabel 2.XX Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (sesuai tabel Provinsi) Indikator yang dipakai dari mulai Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (berurutan)	30	Sudah disusun/dipenuhi sesuai rekomendasi
2.1.4	Kelompok sasaran layanan	√		kelompok sasaran di Bab IV dipindah ke Bab II	33	Sudah disusun/dipenuhi sesuai rekomendasi
2.1.5	Mitra PD dalam pemberian pelayanan (JIKA ADA)			tidak ada		
2.1.6	Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja PD (JIKA ADA)			tidak ada		
2.1.7	Kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab PD (JIKA ADA)			tidak ada		
2.2	Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	√		Permasalahan dan Isu Strategis - Isu Permasalahan adalah kondisi nyata di daerah yang harus dihadapi, misalnya kemiskinan atau infrastruktur yang rusak. - Isu Strategis adalah fokus prioritas yang dipilih untuk menyelesaikan / jawaban permasalahan, karena keterbatasan sumber daya. Ini menjadi dasar penentuan alokasi anggaran APBD - Dalam menentukan isu strategis perlu dilakukan dengan mengidentifikasi permasalahan yang ada, menganalisis dampak, dan menentukan prioritas. - Difokuskan pada tahun 2025 dan 2030	33 35 35 35	Sudah disusun/dipenuhi sesuai rekomendasi Sudah disusun/dipenuhi sesuai rekomendasi Sudah disusun/dipenuhi sesuai rekomendasi Sudah disusun/dipenuhi sesuai rekomendasi
2.2.1	Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah;	√				Sudah disusun/dipenuhi sesuai rekomendasi
2.2.2	Isu strategis				35	Sudah disusun/dipenuhi sesuai rekomendasi
	Tabel 2.1 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD	√		Tabel 2.1 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD 	35	Sudah disusun/dipenuhi sesuai rekomendasi
				1. Isu KLHS bisa diambil dari Isu Strategis KLHS pada BAB II RPJMD yang relevan dengan Perangkat Daerah	35	Sudah disusun/dipenuhi sesuai rekomendasi
				3. Bisa mengambil/berpedoman dari RPJMD Bab II Tabel 2.227 Keselarasan Isu Strategis Jangka Menengah Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029 atau disesuaikan dengan kondisi masing2 PD	35	Sudah disusun/dipenuhi sesuai rekomendasi

No	Sistematika Dokumen Renstra	checklist	checklist cdd	Rekomendasi		TINDAK LANJUT
Bab III	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	√			37	Sudah disusun/dipenuhi sesuai rekomendasi
3.1	Tujuan dan Sasaran	√			37	Sudah disusun/dipenuhi sesuai rekomendasi
	Tabel 3.3 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah (dapat diunduh melalui SIPD)			Tambahan kolom IKD RPJMD, IKK RPJMD, IUP  IKD = Tabel 4.4 Hal 1047 IKK = Tabel 4.4 mulai dari fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Dasar (Hal 1050 Perda RPJMD) Indikator Tujuan disamakan dengan apa yang sudah tertuang dalam Bab III RPJMD	39	Sudah disusun/dipenuhi sesuai rekomendasi
	Tabel 3.4 Pentahapan Renstra PD	√		1.  Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah 2. 3. Disesuaikan (harus inline) dengan tahapan pembangunan Tahun 2026-2030 RPJMD dan Tugas & fungsi Perangkat Daerah, Serta prioritas tahunannya.	42	Sudah disusun/dipenuhi sesuai rekomendasi
					42	Sudah disusun/dipenuhi sesuai rekomendasi
					42	Sudah disusun/dipenuhi sesuai rekomendasi
3.2	Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029	√			43	Sudah disusun/dipenuhi sesuai rekomendasi
3.3	Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029	√			44	Sudah disusun/dipenuhi sesuai rekomendasi
	Tabel 3.5 Teknik merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD			1. 	45	Sudah disusun/dipenuhi sesuai rekomendasi
				2. OPERASIONALISASI NSPK: disesuaikan dengan tugas dan fungsi yang relevan, diambil dari Perbup SOTK masing2 bisa ambil di Tugas/Fungsi (pilih yang paling sesuai)	45	Sudah disusun/dipenuhi sesuai rekomendasi
				3. Arah Kebijakan RPJMD melihat pada Tabel 3.9 dan diambil yg kolom Penjabaran	45	Sudah disusun/dipenuhi sesuai rekomendasi
				4. Arah Kebijakan Renstra PD bisa menyusun kalimat sendiri	45	Sudah disusun/dipenuhi sesuai rekomendasi
Bab IV	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	√			45	Sudah disusun/dipenuhi sesuai rekomendasi
4.1	Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	√			45	Sudah disusun/dipenuhi sesuai rekomendasi
	Tabel 4.1 Rumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD (dapat diunduh melalui SIPD)	√		Dapat diunduh di SIPD-RI	49	Sudah disusun/dipenuhi sesuai rekomendasi
4.2	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan	√		1. Daftar program, kegiatan, dan subkegiatan dalam mencapai kinerja PD dimulai dari tahun 2026 hingga tahun 2030 2. Perlu ditambahkan pernyataan eksplisit bahwa program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan PD yaitu pijakan penyusunan Renja PD Tahun 2030. Contoh Pernyataan eksplisit sebagai berikut: Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah, yang menjadi pedoman penyusunan Renja Tahun 2030 sebelum ditetapkan Peraturan Bupati tentang Renstra PD Tahun 2030-2034.	64	Sudah disusun/dipenuhi sesuai rekomendasi
					64	Sudah disusun/dipenuhi sesuai rekomendasi
	Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan	√			64	Sudah disusun/dipenuhi sesuai rekomendasi
4.3	Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah			penyesuaian tabel sesuai provinsi jawa timur  Menyusun Renja PD berdasarkan tugas Sub Kegiatan ke dalam SIPD sesuai fungsi masing	92	Sudah disusun/dipenuhi sesuai rekomendasi
	Tabel 4.3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah				92	Sudah disusun/dipenuhi sesuai rekomendasi
4.4	Subkegiatan yang mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN Tahun 2025-2029;				95	Sudah disusun/dipenuhi sesuai rekomendasi
	Tabel 4.4 Subkegiatan yang mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN Tahun 2025-2029			Perlu ditambahkan Tabel Subkegiatan yang mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN Tahun 2025-2029 (Sesuai Hal 53 Inmendagri 2/2025) 	96	Sudah disusun/dipenuhi sesuai rekomendasi
4.5	Subkegiatan yang mendukung proyek prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029				97	Sudah disusun/dipenuhi sesuai rekomendasi


 Gresik, 20 Oktober 2025
 KAMAT BALONG PANGGANG
NUR SALIM, SH., MH
 NIK 397416141992031003